

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI SWEDIA
TERHADAP ALIANSI *NORTH ATLANTIC TREATY*
ORGANIZATION (NATO)**

Skripsi

Oleh :

Ghaitsya Shofa Az-zahra

2116071012



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI SWEDIA TERHADAP ALIANSI *NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION* (NATO)

OLEH

GHAITSYA SHOFA AZ-ZAHRA

Perubahan kebijakan luar negeri Swedia dalam bergabung dengan NATO menjadi salah satu perubahan penting dalam hubungan internasional. Selama hampir dua abad, Swedia konsisten menjalankan kebijakan netralitas, namun invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 memicu perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Swedia. Swedia secara resmi bergabung dengan NATO sekaligus mengakhiri kebijakan luar negeri non-alignment yang selama ini dipertahankan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong perubahan kebijakan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka teori Joakim Eidenfalk. Data diperoleh melalui studi literatur dari data sekunder yang bersumber dari laporan resmi Swedia, pidato pemerintah, dokumen kebijakan Swedia, artikel jurnal, serta publikasi dari sumber terpercaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO dipengaruhi oleh faktor domestik, seperti dinamika partai politik, dan birokrasi, serta faktor eksternal, yaitu eskalasi konflik di Eropa yang mengancam stabilitas kawasan. Partai Sosial Demokrat memainkan peran penting dalam memberikan legitimasi terhadap perubahan kebijakan tersebut, sementara invasi Rusia ke Ukraina menjadi pemicu utama perubahan orientasi kebijakan luar negeri Swedia dari non-alignment menjadi alignment. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Swedia dipengaruhi oleh interaksi antara faktor domestik dan internasional.

Kata Kunci: Swedia, kebijakan luar negeri, NATO, non-alignment, invasi Rusia

ABSTRACT

SWEDEN'S FOREIGN POLICY CHANGE TOWARDS THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO)

BY

GHAITSYA SHOFA AZ-ZAHRA

Sweden's decision to join NATO represents a significant shift in the country's foreign policy and international relations. For nearly two centuries, Sweden maintained a consistent policy of neutrality; however, Russia's invasion of Ukraine in 2022 triggered a major change in Sweden's foreign policy orientation. Sweden formally joined NATO, effectively ending its long-standing non-alignment policy. This study aims to analyze the factors driving this policy change using a descriptive qualitative approach within the theoretical framework of Joakim Eidenfalk's foreign policy change theory. Data were obtained through a literature study of secondary sources, including official Swedish government reports, government speeches, policy documents, academic journal articles, and reputable publications. The findings indicate that Sweden's decision to join NATO was influenced by domestic factors, such as party politics and bureaucracy, as well as external factors, namely the escalation of conflict in Europe that threatens regional stability. The Social Democratic Party played a key role in legitimizing the policy shift, while Russia's invasion of Ukraine served as the main trigger for Sweden's move from non-alignment to alignment. Thus, this study highlights how Sweden's foreign policy change was shaped by the interaction between domestic and international factors.

Keywords: Sweden, foreign policy, NATO, non-alignment, Russian invasion.

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI SWEDIA TERHADAP AIANSI
*NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO)***

Oleh

GHAITSYA SHOFA AZ-ZAHRA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI
SWEDIA TERHADAP ALIANSI *NORTH
ATLANTIC TREATY ORGANIZATION* (NATO)**

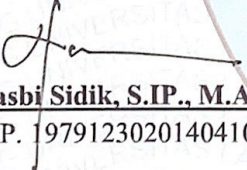
Nama Mahasiswa : **Ghaitsya Shofa Az-Zahra**

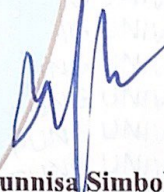
Nomor Pokok Mahasiswa : 2116071012

Program Studi : Hubungan Internasional

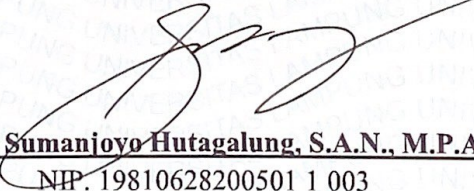
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP. 197912302014041001


Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.
NIP. 199209262024092001

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumanjaya Hutagalung, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

Sekretaris : Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.

Penguji Utama : Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Juni 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali, arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Ghaitsya Shofa Az-Zahra
NPM 2116071012

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 Agustus 2003, merupakan anak ke-dua dari empat bersaudara, dari Ayah H. Nanang Wahidin, M.Pd. dan Bunda Hj. Titi Sunarti S.ST., M.Kes.

Penulis memulai pendidikan dasar di SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPIT Insan Robbani Kotabumi, dan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Ogan Komerling Ilir.

Pada tahun 2021, Penulis berhasil masuk menjadi salah satu mahasiswa baru di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama duduk di bangku kuliah, penulis aktif mengikuti kegiatan di dalam dan di luar kampus. Penulis terlibat dalam acara Lampung Youth Summit Ecopreneurship yang diadakan oleh Gajah Putih dan berhasil terpilih menjadi *best presentation* di dalam acara tersebut. Penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi di kampus melalui himpunan mahasiswa jurusan hubungan internasional dan menjabat sebagai kepala divisi bidang sosial dan lingkungan. Penulis juga mengambil bagian menjadi kepala divisi pada bidang konsumsi dalam acara Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia ke-36 di Universitas Lampung. Penulis juga berkesempatan mendapatkan pengalaman kerja profesional melalui program magang mandiri yang penulis lakukan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Lampung.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

‘Allah does not charge a soul except [with that within] its capacity’

(QS. Al-Baqarah 2:286)

“Kamu butuh tiga hal untuk dapetin keinginanmu. Tekad, tujuan, dan langkah ke depan” (Khail Adnan)

“Waktu dan tenaga yang terkuras untuk belajar nggak akan sia-sia, karena suatu saat kamu akan sadar ada banyak hal yang kamu dapatkan bahkan ketika kamu gagal”
(Hadian Putra Ranggo)

PERSEMBAHAN

Untuk Ayah, Bunda, Teteh, Abang, dan Adik tersayang
serta seluruh pembaca

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul “*Perubahan Kebijakan Luar Negeri Swedia terhadap Aliansi North Atlantic Treaty Organization (NATO)*” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Abang Hasbi Sidik, S. IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta berbagi pengetahuan selama masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
4. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang senantiasa memberika bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu sesuai harapan;
5. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembahas Skripsi, yang telah memberikan banyak saran, masukan serta pengetahuan, kepada penulis sehingga mendorong penulis untuk senantiasa memperbaiki skripsi dan menambah banyak pengetahuan khususnya dalam bidang Hubungan Internasional;
6. Seluruh dosen, staf, serta tenaga kependidikan di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu,

waktu, dan dukungan yang berarti kepada penulis dalam proses belajar dan pengembangan diri, mulai dari awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini;

7. Keluarga tercinta, Ayah Nanang, Bunda Titi, Tete Fasya, Abang Farhan, Adik Syakira, yang selalu memberikan dukungan dan doa tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Feorela, sahabat yang senantiasa menemani, menghibur, dan memberikan motivasi sejak duduk di bangku SMA hingga saat ini, sehingga penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas setiap semangat, cerita dan dukungannya selama ini;
9. Sondang Angelina, Syafira Nurrahma, dan Yusiva Ananta, sahabat seperjuangan yang telah menemani penulis dari awal duduk di bangku perkuliahan hingga saat ini dan senantiasa mendampingi penulis disaat senang dan sedih;
10. Azkya Zahara Maharani dan Daulah Siadah, sahabat penulis sejak duduk di bangku SMA. Meskipun berjauhan, namun cerita, semangat dan dukungan mereka senantiasa mendampingi selama proses penulisan skripsi;
11. Dilla, Ica, Salma, Intan, Syifa, Febi, Fariza, dan seluruh teman-teman “jodoh anak tunggal” atas semangat dan ceritanya yang senantiasa menemani penulis selama proses penyusunan skripsi;
12. M.Sczasimbi Barantis Putra dan Ummi Nida Afifa, teman seperjuangan selama duduk di bangku perkuliahan maupun dalam organisasi. Terimakasih atas bantuan dan kepercayaannya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan banyak pengalaman selama perkuliahan;
13. Teman-teman organisasi selama perkuliahan. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, khususnya seluruh anggota divisi *Social and Enviroment* dan seluruh anggota divisi konsumsi pada PNMHII yang telah berbagi banyak momen bersama serta memberikan banyak pengalaman kepada penulis;

14. Seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat, doa, dukungan, dan bantuan kepada penulis selama proses penulisan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini;
15. Ghaitsya, atas kepercayaan dan semangatnya, Terimakasih untuk selalu berusaha mencapai akhir. Mari terus berusaha untuk mencapai yang terbaik, hari ini, besok, dan selamanya.

Bandar Lampung, 16 Juni 2025

Ghaitsya Shofa Az-Zahra
NPM. 2116071012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR SINGKATAN.....	iii
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Tinjauan Teori.....	12
2.2.1 Foreign policy change.....	12
2.2.2 Aliansi.....	16
2.3 Kerangka Pemikiran.....	17
 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	 19
3.2 Fokus Penelitian	19
3.3 Sumber Data	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.5 Teknik Analisis Data.....	22
3.6 Uji Validitas Data.....	23
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 24
4.1 NATO Sebagai sebuah aliansi	24
4.1.1 Hubungan Kerja Sama Swedia dan NATO	28
4.2 Perubahan Kebijakan Luar Negeri Swedia terhadap NATO	31
4.2.1 Faktor domestik	35
4.2.2 Faktor Internasional	60
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	 73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	75
 DAFTAR PUSTAKA.....	 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Negara anggota NATO sebelum bergabungnya Swedia.....	6
Gambar 2 Negara Anggota NATO setelah bergabungnya Swedia	7
Gambar 3 Kerangka Pemikiran.....	18
Gambar 4 Hasil jajak pendapat keanggotaan NATO tahun 1996 – 2019	37
Gambar 5 Hasil jajak pendapat pasca-keputusan pemerintah.....	39
Gambar 6 Hasil jajak pendapat pasca-keputusan Finlandia.....	40
Gambar 7 Rapat parlemen Riksdag.....	51
Gambar 8 Pertemuan Menteri Keamanan Swedia dan Finlandia	70

DAFTAR SINGKATAN

CBRN	: <i>Chemical Biological, Radiological and Nuclear</i>
EADRCC	: <i>Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre</i>
ISAF	: <i>International Security Assistance Force</i>
KFOR	: <i>Kosova Force</i>
MOU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
OCC	: <i>Operational Capabilities Concept</i>
OUP	: <i>Operation Unified Protector</i>
PBB	: <i>Persatuan Bangsa Bangsa</i>
PfP	: <i>Partnership for Peace</i>
PKK	: <i>Partai Pekerja Kurdistan</i>
NMI	: <i>NATO Mission Iraq</i>
NORDEF	: <i>Nordic Defense Cooperation</i>
NRF	: <i>NATO Response Force</i>
RSM	: <i>Resolute Support Mission</i>
SPS	: <i>Science for Peace and Security</i>
WUDO	: <i>Western Union Defence Organization</i>

BAB I. PENDAHULUAN

Penelitian ini menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap aliansi NATO, dengan menyoroti keputusan historis Swedia untuk mengakhiri status non-aliansi militernya yang telah dipertahankan selama lebih dari dua abad. Kajian ini penting dilakukan mengingat Swedia selama ini dikenal sebagai negara netral yang secara konsisten menghindari keterlibatan dalam konflik, namun akhirnya memilih untuk bergabung dengan NATO di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Keputusan ini menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan luar negeri Swedia yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian sebagai pemahaman dasar dalam memahami fokus penelitian ini.

1.1 Latar Belakang

Swedia merupakan salah satu negara di kawasan Eropa Utara dan merupakan negara nordik dengan wilayah terluas. Negara ini berbatasan secara langsung dengan tiga negara berbeda. Di wilayah timur, Swedia berbatasan dengan Finlandia, sedangkan di wilayah utara dan barat, negara ini berbatasan dengan Norwegia. Di sisi barat daya, Swedia berbatasan dengan Denmark. Di bagian Timur dan Selatan, Swedia juga langsung terhubung dengan Laut Baltik yang memisahkan Swedia dengan beberapa wilayah berbeda, yaitu Jerman, Denmark, Polandia, Lithuania, Latvia, dan Kaliningrad, yang merupakan salah satu kota administratif Rusia. Letak geografis ini sekaligus menjadikan Swedia negara yang terhubung dengan negara-negara Skandinavia (Sweden, 2025)

Swedia menjadi salah satu negara Nordik yang menerapkan kebijakan non-blok dalam hal kebijakan luar negerinya yang telah menjadi ciri khas dalam

kebijakan luar negeri negara ini sejak awal abad ke-19, tepatnya setelah berakhirnya Perang Napoleon (Lundmark, 2022). Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap kondisi yang tidak menguntungkan bagi Swedia setelah negara tersebut kehilangan Finlandia yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaannya. Kekalahan dalam perang mengakibatkan Finlandia diduduki oleh Rusia. Pada tahun 1834, Pangeran Charles XIV Johan mendeklarasikan posisi Swedia sebagai negara non-blok (Brommesson et al., 2022). Pernyataan ini disampaikan melalui surat yang dikirimkan kepada dewan pengadilan Britania Raya dan Rusia, dimana ia mendesak kedua negara tersebut untuk menghormati keputusan Swedia tidak terlibat dalam konflik (Keyton, 2024). Deklarasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Swedia tidak akan terlibat dalam perang atau konflik militer antara negara-negara besar, yang saat itu sedang memanas, seperti konflik antara Britania Raya dan Rusia (Brommesson et al., 2022).

Dalam konteks ini, ketidakberpihakan Swedia bukan hanya sebuah langkah untuk melindungi negara dari ancaman, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga stabilitas keamanan negara pasca-Perang Napoleon. Swedia berupaya untuk menjaga keseimbangan hubungan antara Swedia dan kedua kekuatan, Inggris dan Rusia, pada saat itu (Brommesson et al., 2022).

Swedia, setelah deklarasinya sebagai negara non-blok, kembali dihadapkan oleh berbagai peristiwa konflik yang terjadi di Eropa. Ketika perang dunia satu terjadi, di tahun 1914, Swedia menyatakan negaranya tetap pada posisinya sebagai negara netral. Hal ini turut didasari oleh hubungan kerja sama yang terjalin antara Swedia dan negara-negara yang terlibat perang dunia satu, terutama dalam konteks kerja sama perdagangan (Saputra & Indrawati, 2024). Meski demikian, baik Inggris maupun Jerman yang pada saat itu terlibat sebagai negara yang berperang, mendesak negara Skandinavia, yakni Denmark, Swedia, dan Norwegia, untuk terlibat dan berpihak dalam perang, tetapi Swedia berhasil mempertahankan sikapnya (Qvarnström, 2014).

Pada Desember 1914, Swedia bahkan memperkuat kerja sama dengan negara-negara Skandinavia melalui pertemuan antara para pemimpin ketiga

negara di Malmö, Swedia selatan, yang tidak hanya menegaskan ketidakberpihakan Swedia dan negara-negara Skandinavia lainnya dalam Perang Dunia, tetapi juga menunjukkan komitmen Swedia untuk mempertahankan perdamaian dan netralitasnya (Kubala, 2021).

Komitmen ini terus berlanjut ketika Perang Dunia II dan perang dingin berlangsung. Swedia tetap menyatakan dirinya tidak berpihak kepada negara atau aliansi manapun ketika Perang Dunia II berlangsung. Namun, setelah pendudukan Norwegia dan Denmark oleh Jerman, Swedia mendapat tekanan untuk melonggarkan sikap netralnya. Hingga pada Juli tahun, Swedia kemudian menandatangani kerja sama transit dengan Jerman, dimana Swedia mengizinkan Jerman untuk mengirim barang dan tentaranya melalui wilayah Swedia (Weibull, 2025).

Perjanjian ini kemudian berakhir ketika kekuatan Jerman mulai melemah dan ditandatanganinya perjanjian antara Swedia dan Sekutu tahun 1943 yang isinya menyetujui pembatasan kerja sama perdagangan antara Swedia dengan Jerman, serta disetujuinya permohonan Swedia oleh Amerika Serikat dan Inggris, terkait peningkatan ekspor, terutama untuk komoditas minyak dan karet. Tekanan diplomatik Sekutu yang berkelanjutan dan runtuhnya kekuasaan Nazi membuat Swedia secara bertahap mengurangi dan pada akhirnya mengakhiri perdagangannya dengan Jerman (*Sweden National Archives*, 2016).

Meskipun tetap memegang prinsip ketidakberpihakan, tidak menutup Swedia untuk terus menjalin kerja sama dengan negara-negara lain. Swedia juga secara resmi bergabung dengan organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca Perang Dunia II. Swedia bergabung pada 1946 bersamaan dengan bergabungnya Islandia dan Afghanistan. Keputusan ini diambil sebab Swedia melihat PBB sebagai organisasi perdamaian dan memiliki prinsip yang sama dan dapat mendukung kebijakan luar negeri Swedia. Melalui PBB, Swedia berkontribusi dalam pencegahan konflik, upaya perdamaian, pembangunan kembali negara-negara yang terkena konflik, pelucutan senjata dan non-proliferasi (*Sweden and the UN*, 2023).

Swedia juga telah menjalin hubungan kerja sama yang erat dengan aliansi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Pada 1994, Swedia secara resmi mulai berpartisipasi dalam program *Partnership for Peace* (PfP), yang bertujuan untuk membangun kepercayaan serta memfasilitasi kerja sama antara NATO dan negara-negara non-anggota di wilayah Euro-Atlantik. Kerja sama ini berfokus pada pengembangan stabilitas dan keamanan bersama. Pada 1997, Swedia juga bergabung dengan Dewan Kemitraan Euro-Atlantik, sebuah forum dialog politik yang mempertemukan semua anggota NATO dengan negara-negara mitra di kawasan tersebut (NATO, 2024). Forum ini bertujuan untuk memperdalam hubungan politik dan kerja sama yang lebih luas, yang melengkapi kerja sama praktis dalam program PfP. Angkatan bersenjata Swedia secara aktif terlibat dalam berbagai latihan militer bersama NATO. Swedia juga turut mengambil peran sebagai tuan rumah pelatihan dan latihan yang dipimpin NATO, serta bekerja sama dengan NATO dalam hal standarisasi dan pengembangan kemampuan dalam rangka memperkuat kemitraannya dengan NATO (Regeringskansliet, 2023b).

Pada abad ke-21, Keamanan Eropa kembali dilemahkan oleh agresivitas Rusia. Serangan yang dilakukan Rusia ke Georgia pada 2008, Aneksasi Rusia terhadap Ukraina di wilayah Krimea di tahun 2014, serta keterlibatan Rusia dalam perang Suriah di tahun 2015 memperlihatkan bagaimana Rusia secara aktif menggunakan militer dalam mencapai tujuan politiknya (Regeringskansliet, 2024a). Puncaknya adalah invasi penuh yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Perang ini menyebabkan ketidakstabilan keamanan tidak hanya di wilayah Ukraina tetapi juga di kawasan Eropa. Swedia menjadi salah satu negara yang turut mengecam aksi ini dan mengatakan bahwa serangan ini merupakan ancaman serius (Regeringskansliet, 2024b). Swedia secara penuh mendukung Ukraina dengan memberikan bantuan sosial dan militer ke negara tersebut. Swedia juga membatasi aktivitasnya dengan Rusia dan turut memberikan sanksi kepada negara tersebut (Regeringskansliet, 2023a).

Sikap Rusia yang semakin agresif dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran bagi Swedia. Tindakan yang diambil Rusia dianggap

sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan negara tersebut. Pemerintah Swedia menyatakan bahwa Rusia merupakan ancaman keamanan terbesar bagi keamanan nasional Swedia dan sekutu hingga tahun 2030. Situasi keamanan ini dinilai akan bertahan cukup lama. Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, juga menyatakan bahwa serangan Rusia ke Ukraina dianggap sebagai ancaman paling serius sejak berakhirnya perang dunia kedua. Pada pernyataannya dalam laporan strategi nasional Swedia tahun 2024, Ulf Kristersson mengatakan:

“When Russia launched its full-scale invasion of Ukraine, Sweden and many other countries woke up to a new security reality. We are currently in the most serious security situation since the Second World War. The return of big power politics, as evidenced by a number of authoritarian states, is a threat to the world order that has created decades of peace and prosperity...” (Regeringskansliet, 2024b).

Demikian, militer Rusia yang semakin berkembang merupakan faktor eksternal yang memiliki dampak terbesar terhadap situasi keamanan Swedia, kebijakan agresif Rusia yang terus meningkat menjadi ancaman yang serius terhadap stabilitas kawasan Eropa.

Merespons ancaman tersebut, pada tanggal 18 Mei tahun 2022, Swedia secara resmi mengajukan keanggotaan NATO. Keputusan ini juga secara resmi mengakhiri komitmen Swedia sebagai negara netral di kawasan Nordik¹. Swedia menjadi negara terakhir di kawasan Nordik yang mengajukan keanggotaan NATO.

¹ Swedia dan Finlandia mengajukan keanggotaan NATO secara bersamaan pada tanggal 18 Mei tahun 2022. Pemilihan Swedia sebagai topik dalam penelitian ini dibandingkan Finlandia didasarkan pada pertimbangan geografis dan historis yang menunjukkan dinamika kebijakan luar negeri yang lebih kompleks. Secara geografis, Swedia tidak berbatasan langsung dengan Rusia, berbeda dengan Finlandia yang memiliki perbatasan darat sepanjang lebih dari 1.300 kilometer dengan Rusia, sehingga jika dilihat dari posisi negara, tingkat ancaman terhadap Finlandia jauh lebih tinggi (BBC, 2022). Hal ini membuat keputusan Finlandia untuk bergabung dengan NATO lebih mudah dipahami sebagai respons terhadap ancaman langsung. Sementara itu, Swedia memiliki latar belakang historis yang berbeda, di mana negara ini secara konsisten mempertahankan status netral dan tidak pernah menjadi bagian dari aliansi militer mana pun. Sebaliknya, Finlandia pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia pada abad ke-19 setelah wilayahnya dikuasai oleh Rusia (Jussila et al., 1999). Dengan latar belakang tersebut, keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO mencerminkan perubahan kebijakan luar negeri yang lebih drastis dan mencolok, sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam.



Gambar 1. Negara-negara anggota NATO sebelum bergabungnya Swedia

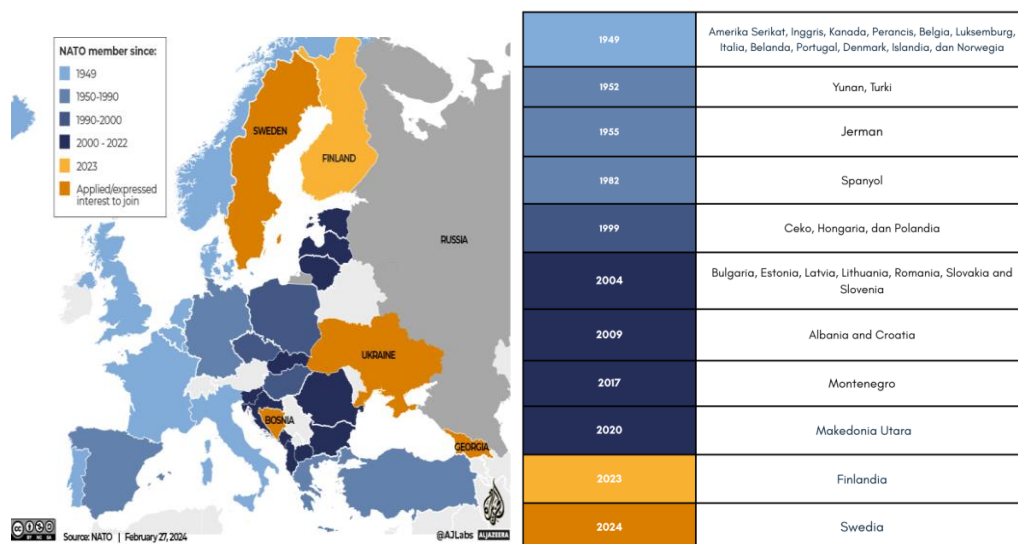
source. Aljazeera. com, 2023

Proses keanggotaan Swedia diwarnai oleh penolakan dari dua anggota NATO, Turki dan Hungaria. Turki menolak keanggotaan Swedia dengan alasan keterlibatan Swedia dalam kelompok terorisme di Turki serta embargo senjata yang dilakukan Swedia pada tahun 2019 ke Turki. Swedia dituding melindungi kelompok Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG) yang dianggap Turki sebagai kelompok teroris yang mengancam negaranya. Swedia juga diklaim menolak mengekstradisi 21 orang yang diduga terkait dengan teroris (*BBC News Indonesia*, 2022). Sikap ini dinilai Turki sebagai bentuk dukungan Swedia terhadap aksi terorisme. Hal ini diperparah dengan insiden pembakaran Al-qur'an yang juga melibatkan politisi sayap kanan, Erasmus Paludan. Turki turut mengomentari insiden tersebut sebagai penghinaan terhadap islam (*BBC News Indonesia*, 2023). Disisi lain, Hungaria menunda jadwal pembahasan masalah ini ke parlemen. Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, menuding Swedia memiliki sikap yang tidak bersahabat kepada negaranya (Kola, 2024). Hungaria bahkan mengkritik sikap Swedia yang dianggap tidak serius untuk menjadi bagian dari NATO (VOA *Indonesia*, 2024).

Merespon penolakan Turki dan Hungaria, Swedia kemudian melakukan negosiasi terhadap kedua negara. Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Finlandia, Antti Kaikkonen, Menteri Pertahanan Swedia, Pal Jonson, menyatakan bahwa permohonan keanggotaan NATO merupakan prioritas utama

kebijakan luar negeri dan keamanan Pemerintah saat itu (*Government.Se*, 2023). Oleh karena itu, Swedia dengan cepat melakukan diplomasi kepada kedua negara tersebut. Perdana Menteri Swedia melakukan pertemuan dengan Presiden Turki, Erdogan. Swedia akan berkomitmen untuk membangun solidaritas dengan Turki, dengan berusaha mendorong penyelesaian terkait isu-isu yang diajukan Turki. Swedia juga secara tegas mengutuk terorisme dan memperbaharui Undang-Undang Kejahatan Terorisme yang lebih ketat, yang mulai berlaku pada 1 Juli 2022 (NATO, 2023). Hal ini menegaskan bahwa negara ini akan terus berdiri bersama negara lainnya dalam memerangi terorisme (Regeringskansliet, 2022b). Sementara disisi lain, Parlemen Hungaria turut memberi respon positif terhadap keanggotaan NATO Swedia dengan memberikan persetujuan terhadap permintaan keanggotaan Swedia (*Al Jazeera*, 2024).

Pada tanggal 7 Maret 2024, Swedia secara resmi menjadi anggota NATO, setelah sebelumnya tertunda selama 18 bulan. Hungaria menjadi negara terakhir yang meratifikasi keanggotaan Swedia di NATO, sebulan setelah Turki menyetujui keanggotaan Swedia.



Gambar 2 Negara Anggota NATO setelah bergabungnya Swedia

source. Aljazeera. com, 2024

Melalui rilis resmi NATO, Sekretaris Jenderal NATO saat itu, Jens Stoltenberg, mengatakan hal ini menjadi hari bersejarah bagi Swedia, setelah sebelumnya

Swedia konsisten menjadi negara netral dengan tidak berafiliasi pada aliansi manapun. Bergabungnya Swedia ke NATO akan menjadi tambahan kekuatan bagi NATO sekaligus memberikan pengamanan lebih kuat terhadap negara tersebut dan seluruh aliansi. Keanggotaan resmi Swedia membuat negara ini turut mendapat perlindungan di bawah artikel 5 perjanjian NATO (NATO, 2024). Bendera Swedia secara resmi dinaikkan bersama bendera 31 sekutu lainnya dalam sebuah upacara di markas NATO di Brussels pada hari Senin 11 Maret 2024, sekaligus menandai berakhirnya netralitas Swedia selama 200 tahun.

Perubahan kebijakan luar negeri Swedia terkait ketidakberpihakannya terhadap Aliansi NATO menimbulkan pertanyaan terkait hal yang melatarbelakangi perubahan ini. Sebagai negara yang selama ini dikenal tidak berpihak pada aliansi manapun, keputusan Swedia untuk mengubah sikapnya dan bergabung dengan NATO memunculkan berbagai pertanyaan, hal ini terutama terjadi ditengah eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina.

Penelitian ini menjadi menarik dilakukan, pertama mengingat perubahan kebijakan luar negeri Swedia menuju keanggotaan NATO merupakan perubahan besar dari kebijakan tradisional kenetralan yang telah dijalankan selama ratusan tahun terakhir. Kedua, meningkatnya ketegangan geopolitik akibat invasi Rusia ke Ukraina, yang turut mendorong perubahan sikap kebijakan luar negeri negara tersebut. Keputusan Swedia untuk mengakhiri tradisi kenetralannya dan mengajukan keanggotaan dalam NATO memperlihatkan adanya dinamika baru dalam politik keamanan kawasan. Oleh karena itu, isu ini menarik untuk diteliti mengapa sikap yang sejak dahulu dipertahankan oleh Swedia mengalami perubahan.

1.2 Rumusan Masalah

Selama lebih dari dua abad, Swedia dikenal tidak pernah berpihak pada aliansi manapun, bahkan ketika terjadinya konflik besar global seperti perang dunia I dan II. Pada tahun 2022, di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina yang semakin memanas, Swedia secara mengejutkan mengajukan keanggotaan tetap aliansi NATO. Keputusan ini menjadi perubahan besar, karena sebelumnya

Swedia tetap mempertahankan ketidakberpihakannya terhadap aliansi NATO meski telah memiliki kerja sama yang erat. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka timbul pertanyaan terkait: **"Mengapa Swedia mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Aliansi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO)?"**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO); dan
- b. Menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap aliansi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO)

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menambah literatur mengenai hubungan internasional, khususnya terkait perubahan kebijakan netralitas Swedia. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemahaman mengenai alasan-alasan yang mendorong perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dalam merespon perubahan global. Hasil ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain untuk menggali topik serupa.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang berisikan tiga bagian utama. Bagian pertama berisikan uraian penelitian terdahulu yang bertujuan untuk membangun kerangka pemikiran dari penelitian ini. Bagian kedua membahas mengenai teori yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri sebagai teori utama serta teori aliansi sebagai teori pendukung. Bagian ketiga memperlihatkan kerangka pemikiran yang menggambarkan alur dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap NATO.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa studi literatur yang relevan dengan topik yang diteliti sebagai acuan dalam membentuk kerangka pemikiran serta menentukan teori dan konsep yang sesuai untuk menganalisis permasalahan terkait. Penelitian ini berfokus pada alasan perubahan kebijakan yang diterapkan oleh Swedia dengan bergabung pada aliansi NATO. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam isu, objek, maupun subjek yang relevan dengan topik yang diteliti, yang tergabung dalam beberapa kelompok pembahasan.

Pada tahun 2022, secara mengejutkan Swedia mengajukan keanggotaan tetap Aliansi NATO. Keputusan ini sekaligus merubah kebijakan militer non-blok yang selama ini diterapkan dan dipertahankan oleh Swedia. Keputusan ini dilihat sebagai akibat dari adanya ancaman keamanan yang dirasakan oleh Swedia akibat dari agresivitas yang dilakukan oleh negara dekatnya, yaitu Rusia (Michalski et al., 2024); (Kaynak, 2023); dan (Thorhallsson & Stude Vidal, 2024). Invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 menjadi pemicu munculnya

keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Serangan yang dilakukan oleh Rusia tidak hanya mengancam Ukraina, tetapi juga secara umum mengancam stabilitas keamanan Eropa.

Dalam penelitian lainnya yang ditulis oleh (Thorhallsson & Stude Vidal, 2024); (Seyaz, 2024); dan (Fiadi, 2024) menilai keputusan yang diambil oleh Swedia sebagai upaya negara untuk mencari perlindungan. Keputusan ini dinilai sebagai bentuk Swedia melindungi negaranya dari ancaman keamanan, terutama ancaman yang diberikan oleh negara dekatnya, Rusia. Swedia melihat bahwa NATO dapat melindungi negaranya melalui kesepakatan pertahanan antara anggota NATO. Bergabung dengan NATO dan mengakhiri status non-bloknya menjadi salah satu cara untuk meredam ancaman yang dilakukan oleh Rusia.

Keputusan Finlandia, negara terdekat Swedia, untuk bergabung ke NATO juga dinilai menjadi alasan Swedia untuk merubah keputusannya bergabung ke NATO. Beberapa Peneliti seperti (Thorhallsson & Stude Vidal, 2024); (Lundqvist, 2023); dan (Forsberg, 2023) menemukan bahwa pandangan masyarakat Swedia terkait keanggotaan NATO turut berubah seiring dengan berubahnya pandangan masyarakat Finlandia mengenai keanggotaan NATO. Artikel Tuomas Forsberg pada tahun 2023 misalnya, memperlihatkan bahwa hampir 60% masyarakat Swedia setuju negaranya bergabung dengan NATO jika Finlandia turut bergabung ke NATO (Forsberg, 2023). Artikel yang ditulis oleh Stefan Lundqvist pada tahun 2022 juga membahas mengenai bagaimana para elit nasional Finlandia meyakinkan Swedia untuk bersama-sama mengajukan keanggotaan penuh NATO. Hasilnya terlihat bagaimana kemudian kedua negara ini secara bersamaan mengajukan keanggotaan NATO.

Beberapa peneliti lainnya beranggapan bahwa keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO juga disebabkan oleh sejarah negara tersebut, terutama sejarah panjang antara Swedia dan NATO. Peneliti seperti (Thorhallsson & Stude Vidal, 2024); (Lundqvist, 2023); serta (Saputra & Indrawati, 2024) melihat bahwa hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Swedia dan NATO menjadi dorongan untuk Swedia segera meresmikan status keanggotaannya, terutama setelah

terjadinya eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, kerja sama ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh Swedia sebelumnya, seperti kerja sama dengan Uni Eropa dan PBB, dinilai akan membawa Swedia kepada kerja sama keamanan, seperti kerja sama dengan NATO. Hal ini kemudian terlihat setelah Swedia secara resmi menjadi anggota tetap aliansi NATO.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 *Foreign policy change*

Dalam memahami alasan yang diambil oleh Swedia untuk merubah kebijakannya, diperlukan suatu pendekatan untuk menganalisis keputusan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, perubahan kebijakan luar negeri mencakup pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Charles Hermann mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai suatu tindakan yang berorientasi pada suatu tujuan atau penyelesaian masalah, yang dirancang oleh pembuat kebijakan, dan ditujukan kepada entitas diluar politik mereka (Haesebrouck & Joly, 2020). Dalam teorinya, Hermann mengkategorikan perubahan kebijakan luar negeri kedalam tiga bentuk perubahan yaitu, perubahan dalam program, perubahan dalam tujuan, atau perubahan orientasi secara keseluruhan (Hermann, 1990).

Pendapat lain dikemukakan oleh Joakim Eidenfalk (2006) dalam jurnalnya yang menyebutkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dapat berdampak, tidak hanya bagi negara itu sendiri, tetapi juga sistem politik internasional. Perubahan kebijakan seperti ini, menurutnya, dapat berdampak pada terciptanya instabilitas dan, dalam beberapa kasus, dapat memicu konflik yang lebih luas (Eidenfalk, 2006). Terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi terjadinya perubahan kebijakan luar negeri.

Dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap aliansi NATO, penelitian ini akan menggunakan kerangka teori perubahan kebijakan luar negeri milik Eidenfalk. Berdasarkan teorinya, Eidenfalk turut menyoroti aspek-aspek yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan seperti aspek media dan opini publik. Baginya, kedua faktor ini turut memberikan peranan

penting dalam mendorong terjadinya perubahan kebijakan luar negeri. Eidenfalk kemudian mengkategorikan penyebab perubahan kebijakan luar negeri kedalam dua kategori, yaitu *domestic factors of change* dan *international factors of change* (Eidenfalk, 2006).

1. *Domestic factors of change*

Faktor domestik memainkan peranan penting dalam memengaruhi serta menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan luar negerinya. Eidenfalk mengidentifikasi faktor domestik ke dalam lima sumber:

a. *The bureaucracy*

Birokrasi seringkali dipandang sebagai sumber stabilitas dibandingkan sebagai faktor penyebab perubahan kebijakan. Sistem birokrasi, pada dasarnya bersifat pasif, hanya bergerak ketika mendapat tekanan. Salah satu sifat birokrasi, menurut Morton Halperin, adalah menolak perubahan. Mayoritas birokrat memilih untuk mempertahankan *status quo* dan sedikit yang menganjurkan perubahan. Birokrasi dan prosedur standar seringkali dianggap sebagai hambatan dalam melakukan perubahan kebijakan. Meski demikian, birokrasi tetap dapat berperan dalam perubahan kebijakan luar negeri. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Hermann, dimana kelompok yang berada dalam suatu pemerintahan dapat memberikan dorongan perubahan (Hermann, 1990). Hal inilah yang mendasari birokrasi sebagai salah satu faktor dalam perubahan kebijakan luar negeri.

b. *Public Opinion*

Opini publik menjadi salah satu faktor penting dalam perubahan kebijakan luar negeri. Hal ini karena pemerintah membutuhkan dukungan dari publik untuk menjalankan kebijakannya. Ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah dapat menjadi tekanan bagi para pengambil keputusan yang mendorong terjadinya perubahan. Selain itu, opini publik juga dimanfaatkan oleh para kelompok kepentingan dan aktor masyarakat lainnya untuk mendukung upaya mereka dalam memengaruhi perubahan kebijakan.

c. *The Media*

Berbagai studi telah menyoroti bagaimana media berperan dalam memahami kebijakan luar negeri dan dinamika politik global, terutama di era globalisasi seperti sekarang (Robinson, 2017). Media memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai pendukung opini publik, media juga turut berperan sebagai saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Media juga dapat berperan sebagai pengawas kebijakan dengan memberikan informasi bagi pemerintah maupun masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Sikap media yang mendukung atau menolak suatu kebijakan serta kontribusi media dalam membentuk opini publik dapat memberikan tekanan tambahan terhadap pengambil keputusan. Oleh sebab itu, media dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung perubahan kebijakan.

d. *Interest Group*

Kelompok kepentingan mengacu kepada kelompok yang terorganisir yang terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan keputusan pemerintah. Kelompok ini mencakup pada organisasi-organisasi yang dibentuk dengan kepentingan tertentu, seperti organisasi profesi, kelompok firma hukum, dan kelompok kepentingan lainnya. Pengaruh kelompok ini meningkat sejak beberapa dekade terakhir, terutama dalam fokus-fokus tertentu. Kelompok ini dapat memengaruhi para pengambil keputusan, karena mengabaikan tuntutan mereka berisiko menyebabkan hilangnya dukungan suara terhadap pemerintahan.

e. *Political parties*

Kelompok ini merujuk kepada partai politik dalam parlemen, termasuk partai oposisi. Tekanan dari pemilih atau opini publik secara umum dapat mendorong anggota parlemen untuk menekan pemerintah atas isu atau kebijakan tertentu. Di sisi lain, pemerintah seringkali bergantung pada partai politik atau anggota partai itu sendiri, sehingga dalam hal ini pandangan partai politik dinilai cukup berperan penting dalam merumuskan kebijakan.

Faktor domestik memainkan peran penting dalam mendorong terjadinya perubahan kebijakan luar negeri. Lima sumber perubahan tersebut, menurut Eidenfalk, dapat menjadi sumber yang mengubah kebijakan luar negeri suatu negara. Sementara faktor-faktor domestik memberikan kerangka dalam memahami perubahan kebijakan luar negeri, teori Joakim Eidenfalk juga menekankan pentingnya faktor-faktor internasional yang berpengaruh besar dalam proses tersebut. Oleh karena itu, bagian selanjutnya akan mengulas faktor-faktor internasional yang turut mendorong perubahan kebijakan luar negeri.

2. International factors of change

Politik internasional merupakan sebuah sistem yang kompleks, yang terdiri dari banyak aktor yang saling berinteraksi. Dalam penelitiannya, Eidenfalk menggunakan teori realisme dan interdependensi kompleks dalam menjelaskan faktor faktor internasional yang dapat mendorong terjadinya perubahan kebijakan luar negeri. Menurutnya, kedua teori ini dapat menjelaskan secara lebih dalam mengenai aspek negara yang ditekankan oleh realis serta aspek politik internasional dan aktor lain di dalam teori interdependensi. Eidenfalk membagi faktor internasional kedalam empat sumber:

a. Global factor

Faktor global berfokus pada perubahan dalam sistem politik internasional yang berdampak secara global sehingga memengaruhi keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam hal ini, pengaruh suatu peristiwa, aktor tertentu, pergeseran norma internasional, perubahan keseimbangan dalam politik luar negeri, hingga suatu institusi internasional dapat memengaruhi suatu negara dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, termasuk perubahan kebijakan luar negeri.

b. Regional factor

Faktor regional mengacu pada suatu peristiwa atau aktor pada tingkat regional yang dapat berdampak pada perubahan didalam regional tertentu. Aktor-aktor regional, seperti organisasi atau institusi regional dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dalam mengambil kebijakan, termasuk dalam kebijakan luar negeri. Keseimbangan kekuatan juga berpengaruh

terhadap pembentukan suatu kebijakan luar negeri, dimana kekuatan dan kapasitas suatu negara mempengaruhi dinamika politik kawasan.

c. Bilateral relations

Faktor ini melihat hubungan suatu negara, dengan negara atau aktor lain sebagai salah satu alasan yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Hubungan ini dapat berupa kerja sama perdagangan, kerja sama militer, aliansi, hingga ancaman militer dan ekonomi yang dapat digunakan untuk menekan negara tertentu agar mengadopsi atau merubah kebijakan luar negerinya.

d. Non-state actor

Pengaruh dari aktor transnasional dinilai semakin besar. Aktor-aktor transnasional seperti jaringan kriminal, teroris, korporasi, hingga organisasi transnasional dapat membentuk hingga memengaruhi kebijakan luar negeri negara. Dalam isu-isu tertentu, kelompok ini memiliki peran dan pengaruh yang signifikan, sehingga dalam perkembangannya, aktor non negara ini dapat berdampak terhadap perubahan kebijakan luar negeri.

2.2.2 Aliansi

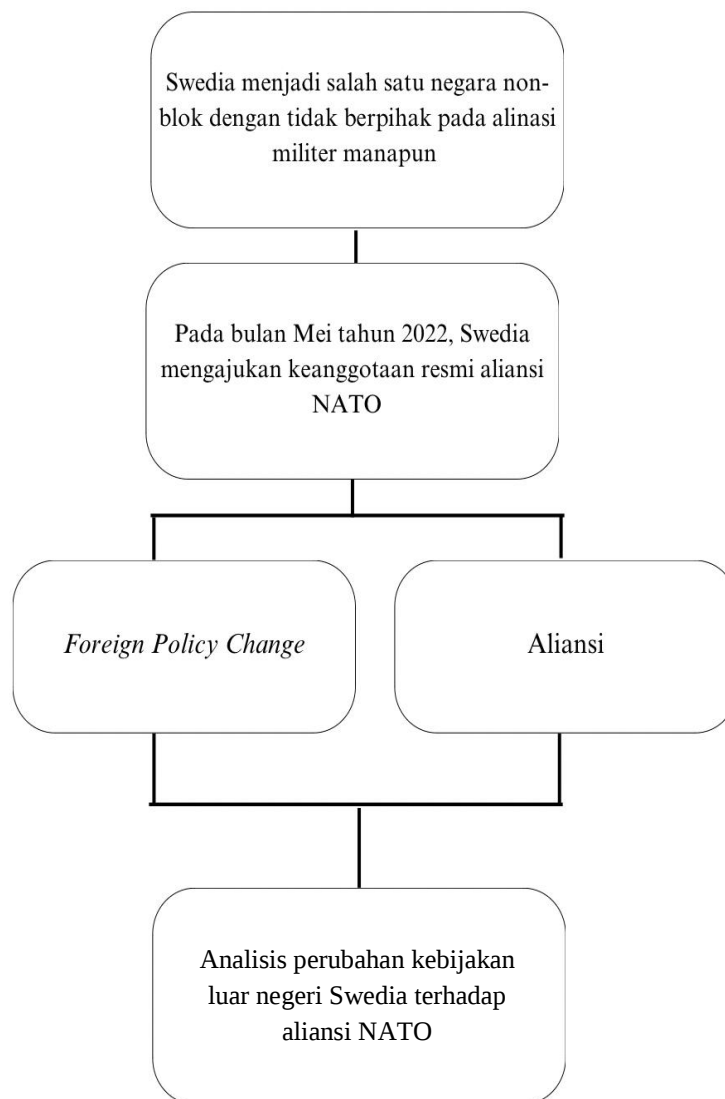
Dalam memahami posisi NATO terhadap Swedia pada topik ini, penelitian ini menggunakan konsep aliansi sebagai kerangka analisis. Stephen M. Waltz, dalam bukunya yang berjudul *the origins of alliances* (1987), mendefinisikan aliansi sebagai sebuah perjanjian kerja sama keamanan, baik secara formal maupun informal, yang dilakukan oleh dua atau lebih negara berdaulat. Waltz menjelaskan bahwa perjanjian formal didasarkan pada pemahaman dokumen tertulis yang mengikat secara hukum, sementara perjanjian informal diwujudkan dalam bentuk tindakan dan lisan secara tidak tertulis. Aliansi paling sering dipandang sebagai respon terhadap suatu ancaman. Menurut Waltz, ada dua alasan mengapa negara membentuk atau bergabung dengan aliansi, yaitu *balancing* dan *bandwagoning*. *Balancing* dilakukan negara-negara untuk bekerja sama atau beraliansi dalam menghadapi ancaman bersama. Negara-negara akan bergabung dengan aliansi untuk menghindari dominasi oleh kekuatan yang lebih kuat. Konsep ini berangkat dari asumsi dimana negara-negara dengan kekuatan yang lebih lemah saling mengikat diri satu-sama lain untuk menghadapi ancaman

utama dengan kekuatan yang lebih besar. Menurutnya, ada dua alasan negara-negara memutuskan untuk *balancing*, yaitu sebagai bentuk mempertahankan diri dan meningkatkan pengaruh. Sementara itu, *bandwagoning* diasumsikan bahwa negara menjalin kerja sama dengan negara yang menjadi ancaman utama (Walt, 2013). Sederhananya, *balancing* dilakukan dengan negara yang lebih lemah, sebaliknya *bandwagoning* dilakukan dengan negara yang lebih kuat.

Definisi lain diungkapkan oleh Glenn Snyder yang menyebutkan aliansi sebagai sarana dalam mengamankan diri dari musuh. Glenn mendefinisikan aliansi sebagai sebuah deklarasi bersama untuk bertindak dengan cara tertentu sesuai dengan yang telah disepakati, dengan menggunakan atau tidak menggunakan kekuatan militer, dalam situasi tertentu, dan terhadap negara-negara di luar keanggotaan (Williams, 2008). Melalui definisinya, Glenn menekankan bahwa fungsi utama aliansi adalah untuk mengumpulkan kekuatan militer dalam menghadapi musuh bersama.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai alasan Swedia bergabung menjadi anggota aliansi NATO setelah sebelumnya secara konsisten menerapkan kebijakan non-blok dengan tidak bergabung dengan aliansi militer manapun. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dibuat penulis untuk membantu dalam membangun pola pikir dan memberikan gambaran yang akan digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran
sumber: diolah mandiri untuk kepentingan penelitian.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini mencakup lima aspek utama, yaitu: jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap NATO. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh melalui laporan resmi pemerintah Swedia, pidato para pejabat, serta berbagai kajian ilmiah dan berita media dari sumber yang kredibel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan teknik analisis data mengikuti model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Creswell dan John (2018) penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami makna yang diberikan oleh suatu individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial yang kemudian menimbulkan suatu pertanyaan penelitian. Pendekatan ini mencakup pengumpulan data secara langsung, analisis induktif, serta interpretasi peneliti terhadap data. (Creswell & John 2018). Hal yang sama juga disampaikan oleh Alan Bryman dimana ia menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif memiliki sifat induktif, interpretif, dan konstruktif (Bryman, 2012). Pendekatan ini dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dalam mendeskripsikan NATO serta menjelaskan alasan Swedia bergabung menjadi anggota NATO.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap aliansi NATO. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan luar negeri untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Swedia dan aliansi untuk melihat posisi NATO dalam permasalahan ini. Fokus penelitian akan memberikan batasan riset terkait data yang relevan sesuai dengan masalah yang akan diteliti untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga menghindari terjadinya perluasan masalah penelitian. Dengan berpedoman pada fokus penelitian terkait alasan di balik perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap NATO, penelitian ini diharapkan dapat menganalisis serta menjawab pertanyaan penelitian secara detail dan kredibel.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder sebagai sumber data utama. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi berbagai dokumen dan publikasi, yaitu:

- a. Rilis resmi pemerintah Swedia melalui situs *government offices of Sweden* (www.government.se) serta rilis resmi yang dikeluarkan oleh NATO melalui situs (www.nato.int), mencakup pernyataan dari pemerintah Swedia dan NATO, rilis berita terkait perubahan kebijakan luar negeri, serta komunikasi diplomatik terkait perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap Aliansi NATO sebagai sumber data dalam menganalisis faktor domestik seperti peran birokrasi dan partai politik mengenai perubahan kebijakan luar negeri Swedia.
- b. Dokumen resmi yang memuat pernyataan, strategi, serta arah kebijakan luar negeri Swedia untuk menganalisis faktor eksternal dalam perubahan kebijakan luar negeri Swedia, mencakup antara lain:
 - Dokumen mengenai kebijakan luar negeri Swedia tahun 2023 dan 2024.
 - Dokumen *Sweden National Security Strategy* tahun 2023 dan 2024.

- c. Publikasi yang dikeluarkan oleh institusi yang relevan seperti *Congressional Research Service*, dan *Atlantic Council Policy on Intellectual Independence*.
- d. Lembaga think tank seperti *Norwegian Institute of International Affair*, *International Institute for Strategic Studies*, *Stockholm International Peace Research Institute*, dan *Center for Strategic and International Studies*.
- e. Hasil survey yang dikeluarkan oleh lembaga survey nasional seperti Novus, Ipsos, dan *SOM Institue* sebagai sumber dalam menganalisis perubahan opini publik Swedia.
- f. Artikel ilmiah, jurnal akademik, buku, serta publikasi akademis yang membahas teori dan studi kasus terkait dinamika perubahan kebijakan luar negeri, dalam konteks perubahan kebijakan Swedia terhadap NATO.
- g. Pemberitaan media dari sumber-sumber media lokal dan internasional, seperti *Dagens Nyheter*, *Svenska Dagbladet*, dan *Aftonbladet*, yang memperlihatkan dinamika perubahan kebijakan dan opini publik dalam negeri serta perubahan *framing* dari media nasional Swedia. Lalu rilisan dari media internasional seperti *Al-Jazeera*, *BBC*, *CNN*, *Deutsche Welle (DW)*, dan *The Guardian*.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur dalam mengumpulkan serta menentukan data-data terkait alasan Swedia bergabung dengan Aliansi NATO. Teknik ini digunakan dengan mengumpulkan data-data dan informasi melalui dokumen resmi, website resmi, buku, jurnal ilmiah, media daring, dan berbagai dokumentasi terkait yang relevan dengan topik masalah. Penulis kemudian menghimpun dan mempelajari berbagai data terkait alasan keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO serta hubungan antara Swedia dan aliansi NATO. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*.

Metode *content analysis* atau analisis konten merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dokumen dan teks, dalam bentuk kata maupun gambar, yang dapat bersifat cetak, tertulis, maupun lisan, dengan tujuan

memahami isi dokumen tersebut dengan menggunakan kategorisasi dan menekankan peran peneliti dalam mengkonstruksi makna dan teks (Bryman, 2016). Pengumpulan data berupa dokumen dan jurnal serta rilisan pers berupa pernyataan-pernyataan yang berasal dari beberapa aktor dari Pemerintahan Swedia yang berkaitan dengan alasan bergabungnya Swedia ke NATO kemudian dikerucutkan dan dikategorisasikan, sesuai dengan penerapan metode analisis konten, secara lebih spesifik untuk mendukung dalam proses pengolahan data.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah dihimpun akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Penelitian ini akan dimulai dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Reduksi data merupakan proses dalam memilih, merangkum, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksikan, dan/atau mentransformasi data yang muncul dalam keseluruhan isi kumpulan hasil wawancara, transkrip, dokumen, peninjauan lapangan, dan sumber materi lainnya. Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan direduksi untuk kemudian akan diambil data yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, data akan ditampilkan dan disusun untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori perubahan kebijakan luar negeri dan aliansi. Tahap terakhir penelitian adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan langkah dalam menginterpretasikan data hasil temuan. Hasil kesimpulan ini juga diverifikasi keabsahannya untuk memastikan kesimpulan yang ditarik adalah valid.

Penelitian ini juga akan menggunakan teknik *coding* sebagai alat bantu dalam melakukan analisis data. Teknik ini berangkat dari asumsi bahwa data yang telah dikumpulkan harus lebih dulu diproses sebelum dilakukan analisis. Cara ini berfokus pada kata-kata sebagai bentuk dasar dari sebuah data yang ditemukan. Teknik ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu *first cycle coding* dan *second cycle coding*. Pada bagian *first cycle coding* berfokus pada penandaan kode-kode sesuai dengan makna dalam setiap data, kode ini biasanya berupa sebuah kode

deskriptif. Selanjutnya pada bagian *second cycle coding*, kode tersebut akan diolah, diorganisir, dan/atau dikategorisasikan sesuai dengan konsep yang berlaku (Miles et al., 2014). Dengan menggunakan teknik ini, penelitian ini bertujuan menjelaskan alasan Swedia bergabung dengan aliansi NATO secara sistematis.

3.6 Uji Validitas Data

Uji validitas data merupakan metode yang digunakan untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif. Denzin (1978) menyebutkan bahwa triangulasi memberikan pemahaman yang lebih utuh dan mendalam dengan menggabungkan berbagai metode atau sumber data yang diperlukan (Denzin, 2017). Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi sumber sebagai metode uji validitas data.

Metode triangulasi sumber digunakan untuk memastikan validitas data sekunder melalui perbandingan berbagai sumber. Triangulasi sumber, merupakan teknik yang melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk memverifikasi temuan dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Triangulasi sumber merujuk pada proses pemeriksaan data yang diperoleh dari berbagai informan atau sumber yang berbeda. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data dengan cara membandingkan dan memverifikasi informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian melalui beragam pihak. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan merupakan hasil analisis dari berbagai perspektif, sehingga memiliki validitas yang lebih kuat (Wiyanda Vera Nurfajriani, 2024).

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai perubahan kebijakan luar negeri Swedia terhadap aliansi NATO. Pada bagian kesimpulan, peneliti memaparkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah diajukan, dengan menyoroti faktor-faktor utama yang mendorong perubahan kebijakan tersebut. Kesimpulan ini mencakup penjelasan mengenai pengaruh faktor domestik seperti opini public dan dinamika politik dalam negeri serta faktor internasional seperti tekanan keamanan regional dan hubungan Swedia dengan negara lain. Selanjutnya, bagian saran ditujukan kepada para pengkaji hubungan internasional sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji lebih lanjut dinamika perubahan kebijakan luar negeri Swedia.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian terkait alasan Swedia bergabung ke aliansi NATO setelah secara konsisten menjadi negara non-aliansi militer. Keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO merupakan perubahan besar dalam sejarah kebijakan luar negerinya yang selama hampir dua abad identik dengan prinsip netralitas. Perubahan ini merupakan respons terhadap dinamika keamanan internasional yang berubah secara drastis, terutama setelah invasi besar-besaran yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri Swedia menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan geopolitik global. Melalui pendekatan teoritis Joakim Eidenfalk yang membagi faktor penyebab perubahan kebijakan luar negeri menjadi faktor domestik dan internasional, penelitian ini menjelaskan bahwa kedua dimensi tersebut secara bersamaan memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan Swedia.

Di sisi internasional, ketegangan konflik di Ukraina memperlihatkan ancaman nyata terhadap stabilitas kawasan Eropa. Agresivitas Rusia telah menimbulkan kekhawatiran yang besar, sehingga mendorong negara-negara netral seperti Swedia dan Finlandia untuk mempertimbangkan ulang posisi non-aliansi mereka. Serangan ini menjadi dorongan yang besar untuk Swedia mengubah kebijakan luar negerinya dengan secara resmi bergabung menjadi anggota NATO. Selain itu, Keputusan Finlandia untuk mengajukan keanggotaannya juga berpengaruh besar dalam mendorong pemerintah Swedia untuk segera merampungkan proses keanggotaannya. Masuknya Finlandia sebagai anggota NATO secara praktis meninggalkan Swedia sebagai negara non-aliansi terakhir dikawasan tersebut. Posisi ini mengancam stabilitas keamanan Swedia sehingga keanggotaan NATO menjadi satu-satunya cara untuk Swedia meredam ancaman terhadap negaranya.

Sementara itu, faktor domestik juga turut berperan secara signifikan. Partai politik berperan penting dalam perubahan kebijakan luar negeri ini, terutama perubahan sikap dari Partai Sosial Demokrat yang sebelumnya konsisten mempertahankan kebijakan netralitas menjadi pendukung penuh akses NATO. Dukungan ini menjadi sangat krusial mengingat partai tersebut merupakan kekuatan politik dominan di parlemen. Opini publik Swedia yang semula konsisten menolak gagasan keanggotaan NATO mulai berubah seiring meningkatnya persepsi ancaman dari Rusia, dukungan ini kemudian memuncak setelah pemerintah secara resmi mengajukan keanggotaan Swedia di NATO. Media massa nasional juga secara aktif membingkai isu keamanan sebagai persoalan utama, dengan memperlihatkan narasi bahwa keanggotaan NATO adalah langkah strategis untuk menjamin keselamatan nasional. Dinamika pengajuan keanggotaan NATO kemudian berakhir setelah Parlemen secara resmi menyetujui permintaan pemerintah untuk mengajukan keanggotaan resmi Swedia di aliansi NATO.

Keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO ini kemudian dilihat sebagai hasil dari adanya pengaruh internasional dan domestik yang kemudian

mendorong terjadinya perubahan yang signifikan bagi kebijakan luar negeri Swedia. Ancaman eksternal yang terjadi secara langsung menekan pemerintah untuk mengambil sikap dalam rangka menstabilkan negaranya. Hal ini secara langsung berdampak pada kondisi domestik Swedia yang kemudian mendorong terjadinya perubahan kebijakan ketidakberpihakan Swedia.

5.2 Saran

Peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih dalam terkait alasan Swedia bergabung dengan NATO dengan fokus terhadap faktor eksternal terutama dinamika hubungan Swedia dengan Rusia. Selain itu, hubungan antara Swedia dan negara-negara barat serta negara anggota NATO dibutuhkan untuk dapat memperluas pandangan mengenai pengaruh negara lain terhadap alasan Swedia bergabung dengan NATO. Dengan demikian, penelitian lanjutan akan memberikan lebih banyak perspektif terkait keputusan Swedia untuk mengakhiri kebijakan non-bloknya dan bergabung dengan NATO.

DAFTAR PUSTAKA

- Böller, F., & Wenzelburger, G. (2024). Grasping Foreign and Security Policy Change: Patterns and Conditions of Change Among Liberal Democracies | Article | Politics and Governance. <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/7172>
- Brommesson, D., Ekengren And, A.-M., & Michalski, A. (2022). Sweden's Policy of Neutrality: Success Through Flexibility? In C. De La Porte, G. B. Eydal, J. Kauko, D. Nohrstedt, P. 'T Hart, & B. S. Tranøy (Eds.), *Successful Public Policy in the Nordic Countries* (1st ed., pp. 284–305). Oxford University PressOxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192856296.003.0014>
- Bryman, A. (2012). *Social research methods (4. ed)*. Oxford Univ. Press.
- Bryman, A. (2016). *Social research methods (Fifth edition)*. Oxford University Press.
- Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Transaction Publishers.
- Dietrich, J. W. (1999). Interest Groups and Foreign Policy: Clinton and the China MFN Debates. *Presidential Studies Quarterly*, 29(2), 280–296.
- Eidenfalk, J. (2006). Towards a new model of foreign policy change.
- Emily Sullivan, K. L. (2022, June 16). In Major Shift, Swedish Public Supports NATO Membership [Blog Post]. The Chicago Council on Global Affairs. <https://globalaffairs.org/commentary-and-analysis/blogs/major-shift-swedish-public-supports-nato-membership>
- Essen, C. von. (2023). Resilience in a troubled international climate [Text]. Sakerhetspolisen. <http://sakerhetspolisen.se/ovriga-sidor/other-languages/english-engelska/press-room/swedish-security-services-annual-assements/the-security-service-2022-23/summary/resilience-in-a-troubled-international-climate.html>
- Fiadi, I. R. (2024). Towards NATO Membership: Looking into the End of Sweden's Neutrality Amidst Strategic Shift in Europe: English. *Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies (HJSIS)*, 2(2), 65–83. <https://doi.org/10.20956/hjsis.v2i2.34700>
- Finnish parliament debate: “Important to decide on Nato alongside Sweden.” (2022, April 21). The Local Sweden. <https://www.thelocal.se/20220421/finnish-parliament-debate-important-to-decide-on-nato-with-sweden>

- Forsberg, T. (2023). Finland and Sweden's Road to NATO. *Current History*, 122(842), 89–94. <https://doi.org/10.1525/curh.2023.122.842.89>
- Gelin, M. (2024, March 1). Sweden is joining Nato, but it's hopelessly unprepared for war. *The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/mar/01/sweden-nato-unprepared-vulnerable-attack>
- Gheciu, A. (2005). Security Institutions as Agents of Socialization? NATO and the "New Europe." *International Organization*, 59(4), 973–1012.
- Giordano, P. (2024, May 28). Interoperability: A Cornerstone Concept of NATO. NATO's ACT. <https://www.act.nato.int/article/interoperability-cornerstone-concept/>
- Gustavsson, J. (1998). *The Politics of Foreign Policy Change: Explaining the Swedish Reorientation on EC Membership* [Doctoral Thesis (monograph)]. Lund University Press.
- Haesebrouck, T., & Joly, J. (2020). Foreign Policy Change: From Policy Adjustments to Fundamental Reorientations. *Political Studies Review*, 19(3), 482–491.
- Halperin, M. H., Clapp, P. A., & Kanter, A. (2006). *Bureaucratic Politics and Foreign Policy* | Brookings. Brookings Institution Press.
<https://www.brookings.edu/books/bureaucratic-politics-and-foreign-policy/>
- Hermann, C. F. (1990). Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 34(1), 3–21.
<https://doi.org/10.2307/2600403>
- Hidayat, M. C. (2018). EFEKTIVITAS NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DI AFGHANISTAN MELALUI INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE (ISAF) PERIODE 2003-2014.
- Hongaria Pertanyakan Keseriusan Swedia Masuk NATO. (2024, January 19). VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/hongaria-pertanyakan-keseriusan-swedia-masuk-nato/7446463.html>
- Hungary ratifies Sweden's NATO bid, clearing final obstacle to membership | NATO News | Al Jazeera. (2024, February 26). Al Jazeera.
<https://www.aljazeera.com/news/2024/2/26/hungary-ratifies-swedens-nato-bid-clearing-final-obstacle-to-membership>
- Ivertsson, E., & Krisping, A. (2024). Mediebevakningen av en politisk vändning och opinionsförändring: En diskursanalytisk studie och kvantitativ innehållsanalys av den svenska nyhetsrapporteringen om Nato.
<http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9143898>
- Joly, J., & Dandoy, R. (2018). Beyond the Water's Edge: How Political Parties Influence Foreign Policy Formulation in Belgium. *Foreign Policy Analysis*, 14(4), 512–535.

- Jussila, O., Hentilä, S., & Nevakivi, J. (1999). *From Grand Duchy to a Modern State: A Political History of Finland Since 1809*. C. Hurst & Co. Publishers.
- Kaynak, A. B. (2023). How neutrality lost its appeal as a political strategy: Sweden and Finland's accession to NATO. *Journal of Applied And Theoretical Social Sciences*, 5(3), 236–250.
<https://doi.org/10.37241/jatss.2023.91>
- Keyton, D. (2024, March 2). As Sweden joins NATO, it bids farewell to centuries of neutrality | AP News. AP News. <https://apnews.com/article/sweden-nato-policy-of-neutrality-nonalignment-74ae8d15b2e27f9467634d7cde414625>
- Kola, P. (2024, February 26). Hungary's parliament clears path for Sweden's Nato membership. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-europe-68405893>
- Kubala, A. (2021, September 30). The Three Kings Meeting in 1914.
<https://nordics.info/show/artikel/the-three-kings-meeting-in-1914>
- Ledare: Därför är det rätt för Sverige att kliva in i Nato. (2022, May 15). DN.se.
<https://www.dn.se/ledare/darfor-ar-det-ratt-for-sverige-att-kliva-in-i-nato/>
- Lundmark, M. (2022). Sweden and Finland steering towards NATO - absent anchorage in Ankara: DEFENSE&Industries :: Fondation pour la Recherche Stratégique :: FRS. <https://frstrategie.org/publications/defense-et-industries/sweden-and-finland-steering-towards-nato-absent-anchorage-ankara-2022>
- Lundqvist, S. (2023). A Convincing Finnish Move: Implications for State Identity of Persuading Sweden to Jointly Bid for NATO Membership. *Studia Europejskie - Studies in European Affairs*, 26(4), 73–110.
<https://doi.org/10.33067/SE.4.2022.3>
- Michalski, A., Brommesson, D., & Ekengren, A.-M. (2024). Small states and the dilemma of geopolitics: Role change in Finland and Sweden. *International Affairs*, 100(1), 139–157. <https://doi.org/10.1093/ia/iad244>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An expanded sourcebook* (edition 2). Sage.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Mitchell, J., Bohman, A., Eger, M. A., & Hjerm, M. (2025). Rally around the flag? Explaining changes in Swedish public opinion toward NATO membership after Russia's invasion of Ukraine. *Acta Sociologica*, 68(1), 30–40. <https://doi.org/10.1177/00016993241268185>
- Moran, A. (2015). The North Atlantic Treaty Organization: Continuity and change. In *International Security Studies Theory and practice* (1st edition, p. 306). Routledge.
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315816814-33/north-atlantic-treaty-organization-continuity-change-andrew-moran>

- Morin, J.-F., & Paquin, J. (2018). *Foreign policy analysis: A toolbox*. Palgrave Macmillan.
- NATO. (n.d.). Declaration on a Transformed North Atlantic Alliance—(' "The London Declaration"'). NATO. Retrieved May 6, 2025, from https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23693.htm
- NATO. (2023). Press statement following the meeting between Türkiye, Sweden, and the NATO Secretary General. NATO. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_217147.htm
- NATO. (2025a). NATO member countries. NATO. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52044.htm
- NATO. (2025b). Partnership for Peace programme. NATO. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50349.htm
- NATO. (2025c). Relations with Sweden. NATO. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52535.htm
- NATO - News: Sweden officially joins NATO , 07-Mar.-2024. (2024). https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_223446.htm
- Neack, L., Hey, J. A. K., & Haney, P. J. (1995). *Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in Its Second Generation*. Prentice Hall.
- Nyheter, S. V. T. (2022a, February 25). Analys: Kriget kan förändra synen på ett svenskt Nato-medlemskap. SVT Nyheter. <https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kriget-kan-forandra-synen-pa-ett-svenskt-nato-medlemskap>
- Nyheter, S. V. T. (2022b, April 20). Aftonbladets ledarsida ändrar åsikt – vill att Sverige går med i Nato. SVT Nyheter. <https://www.svt.se/kultur/aftonbladets-ledarsida-andrar-asikt-om-nato>
- Nyheter, S. V. T. (2023, January 25). Historiskt starkt stöd för Nato-medlemskap. SVT Nyheter. <https://www.svt.se/nyheter/inrikes/historiskt-starkt-stod-for-nato-medlemskap>
- Pembakaran Al-Qur'an di Swedia kembali terjadi, pemerintah Indonesia dan warganet bereaksi—Bagaimana menyikapinya? - BBC News Indonesia. (2023). BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0k9dv99p9ko>
- Perang Ukraina: Mengapa Turki tidak ingin Swedia dan Finlandia gabung dengan NATO? - BBC News Indonesia. (2022). BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61553448>
- Person, R., & McFaul, M. (2024, April). Why NATO Is More Than Democracy's Best Defense. *Journal of Democracy*. <https://www.journalofdemocracy.org/online-exclusive/why-nato-is-more-than-democracys-best-defense/>
- Podvorna, O. (2024, October 17). Sweden's Accession to NATO: What Is behind the Decision? PRIF BLOG. <https://blog.prif.org/2024/10/17/swedens-accession-to-nato-what-is-behind-the-decision/>

- Priyanka, S. (2022, Mei). Why some young Swedes are uneasy about joining NATO – DW – 05/18/2022. Dw.Com. <https://www.dw.com/en/why-some-young-swedes-remain-uneasy-about-joining-nato/a-61826790>
- Protokoll 2021/22:114 Måndagen den 16 maj (Riksdagens protokoll 2021/22:114) | Sveriges riksdag. (2022). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/protokoll/protokoll-202122114-mandagen-den-16-maj_H909114/html/
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. *International Organization*, 42(3), 427–460.
- Qvarnström, S. (2014, October 8). Sweden. <https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/sweden/>
- Regeringskansliet, R. och. (2021a, February 24). Statement of Foreign Policy 2021 [Text]. Regeringskansliet; Regeringen och Regeringskansliet. <https://www.government.se/speeches/2021/02/statement-of-foreign-policy/>
- Regeringskansliet, R. och. (2021b, June 10). Defence cooperation between Sweden and Finland [Text]. Regeringskansliet; Regeringen och Regeringskansliet. <https://www.government.se/government-policy/defence-cooperation-between-sweden-and-finland/>
- Regeringskansliet, R. och. (2022a, May 13). Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge—Konsekvenser för Sverige [Text]. Regeringskansliet; Regeringen och Regeringskansliet. <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/05/ds-20227/>
- Regeringskansliet, R. och. (2022b, June 10). Statement of Foreign Policy 2022 [Text]. Regeringskansliet; Regeringen och Regeringskansliet. <https://www.government.se/speeches/2022/06/statement-of-foreign-policy/>
- Regeringskansliet, R. och. (2022c, June 16). Sweden's role in NATO [Text]. Regeringskansliet; Regeringen och Regeringskansliet. <https://www.government.se/government-policy/sweden-in-nato/swedens-role-in-nato/>
- Regeringskansliet, R. och. (2022d, October 28). Sweden's and Finland's NATO membership applications in focus when Minister for Defence visited Finland [Text]. Regeringskansliet; Regeringen och Regeringskansliet. <https://doi.org/10/swedens-and-finlands-nato-membership-applications-in-focus-when-minister-for-defence-visited-finland/>
- Regeringskansliet, R. och. (2022e, November 22). The Government appoints Henrik Landerholm as National Security Adviser [Text]. Regeringskansliet; Regeringen och Regeringskansliet. <https://www.government.se/press-releases/2022/11/the-government-appoints-henrik-landerholm-as-national-security-adviser/>
- Regeringskansliet, R. och. (2023a, February 27). Sanctions against Russia – one year after the full-scale invasion of Ukraine [Text]. Regeringskansliet; Regeringen och Regeringskansliet.

- <https://www.government.se/articles/2023/02/sanctions-against-russia--one-year-after-the-full-scale-invasion-of-ukraine/>
- Regeringskansliet, R. och. (2023b, April 5). Historical relations between Sweden and NATO [Text]. Regeringskansliet; Regeringen och Regeringskansliet. <https://www.government.se/government-policy/sweden-in-nato/history-of-sweden-and-nato/>
- Regeringskansliet, R. och. (2024a, April 17). Why Sweden joined NATO - a paradigm shift in Sweden's foreign and security policy [Text]. Regeringskansliet; Regeringen och Regeringskansliet. <https://www.government.se/speeches/2024/04/why-sweden-joined-nato---a-paradigm-shift-in-swedens-foreign-and-security-policy/>
- Regeringskansliet, R. och. (2024b, July 8). National security strategy [Text]. Regeringskansliet; Regeringen och Regeringskansliet. <https://www.government.se/information-material/2024/07/national-security-strategy/>
- RG 84: Sweden | National Archives. (2016). <https://www.archives.gov/research/holocaust/finding-aid/civilian/rg-84-sweden.html>
- Robinson, P. (2017, September). The Media and Foreign Policy. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/358241910_The_Media_and_Foreign_Policy
- Russian forces launch full-scale invasion of Ukraine. (2022, February 24). Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/24/putin-orders-military-operations-in-eastern-ukraine-as-un-meets>
- Saab välkomnar Nato-beskedet: ”Kommer att konkurrera på lika villkor”. (2024, February 27). Tidningen Näringslivet. <https://www.tn.se/naringsliv/35956/saab-valkomnar-nato-beskedet-kommer-att-konkurrera-pa-lika-villkor/>
- Saputra, A. I., & Indrawati, I. (2024). Ancaman dan Faktor-Faktor yang Mendorong Swedia Bergabung dengan NATO pada Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(3), 465–475. <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i3.3093>
- Seyaz, A. (2024). Change and Continuity in North European Security: Finland and Sweden's Membership in NATO. *Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi*, 12(1), 129–141. <https://doi.org/10.14782/marmarasbd.1431218>
- Sveriges medlemskap i Nato (Betänkande 2022/23:UU16 Utrikesutskottet). (2023, March 22). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/sveriges-medlemskap-i-nato_ha01uu16/
- Sveriges medlemskap i Nato (Proposition 2022/23:74). (2023, March 7). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/sveriges-medlemskap-i-nato_ha0374/

- Sveriges möjligheter att söka medlemskap i Nato (Interpellation 2016/17:6 av Hans Wallmark (M)). (2016, October 13).
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/interpellation/sveriges-mojligheter-att-soka-medlemskap-i-nato_h4106/
- Sweden. (2025). Country Reports.
<https://www.countryreports.org/country/Sweden.htm>
- Sweden and the UN. (2023, January 16). Sweden Abroad.
<https://www.swedenabroad.se/en/embassies/un-new-york/sweden-and-the-un2/>
- Sweden's and Finland's NATO membership applications in focus when Minister for Defence visited Finland—Government.se. (2023, October 28).
<https://www.government.se/articles/2022/10/swedens-and-finlands-nato-membership-applications-in-focus-when-minister-for-defence-visited-finland/>
- Tayie, M. S., & Dashti, I. M. (2018). Parliament and Foreign Policy-Making Process. *Asian Social Science*, 14(2), 165.
<https://doi.org/10.5539/ass.v14n2p165>
- The National SOM Survey Cumulative Dataset. (2021).
<https://doi.org/10.5878/fzjp-br81>
- The Swedish Security Service 2022-2023. (2022). Swedish Security Service.
- The Swedish Security Service 2023-2024. (2023). Swedish Security Service.
- Thorhallsson, B., & Stude Vidal, T. (2024). Sweden's quest for shelter: 'Nonalignment' and NATO membership. *Scandinavian Political Studies*, 47(2), 232–259. <https://doi.org/10.1111/1467-9477.12271>
- Ukraine war: Sweden and Finland confirm Nato plans in historic shift. (2022, May 15). <https://www.bbc.com/news/world-europe-61456726>
- Walt, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. *International Security*, 9(4), 3. <https://doi.org/10.2307/2538540>
- Walt, S. M. (2013). *The Origins of Alliances*. Cornell University Press.
- Weibull, J. (2025). Swedia—Netralitas, Perang Dunia I, Politik | Britannica.
<https://www.britannica.com/place/Sweden/Policy-during-World-War-I>
- Williams, P. D. (2008). *Security Studies_ An Introduction*. Routledge.
- Wiyanda Vera Nurfajriani, M. W. I. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>
- Zhang, L. (2024). New developments in NATO- China relations and their potential impact on Sweden's future relations with China (No. 1). Swedish National China Centre.